

BAB I. PENDAHULUAN

I. 1. Perumusan Masalah

Hutan menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 adalah suatu kesatuan wilayah yang terdiri dari tegakan pohon dan faktor-faktor *abiotis* seperti, air, udara, tanah, dan sinar matahari, serta faktor *biotis* seperti tumbuhan, satwa liar, dan masyarakat yang tergabung dalam kesatuan sifat adat, yang memiliki manfaat secara *tangible* ataupun *intangible* yang dapat diambil dari hutan dan sekitar kawasan hutan sebagai bentuk pengusahaan hutan, pertambangan, dan jasa lingkungan hidup.

Sumberdaya hutan mulai dimanfaatkan secara ekonomis untuk pembangunan nasional sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 yang mengatur tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 mengenai Penanaman Modal Dalam Negeri. Selanjutnya lahir juga Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Undang-Undang Pokok Kehutanan yang mampu meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi nasional, yang bersanding dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968. Implementasinya, lahirlah Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan serta berbagai insentif ekonomi dalam pengusahaan hutan sehingga merangsang tumbuhnya usaha bidang kehutanan khususnya dalam bentuk HPH di Indonesia.

Dalam perjalanannya, sektor kehutanan pernah memegang peranan yang sangat penting dalam perekonomian nasional, khususnya di dalam pemulihan ekonomi nasional pada awal tahun 1970-an. Pada medio tahun 1980-an, Indonesia memulai babak baru sebagai produsen kayu lapis dunia yang layak diperhitungkan. Sejak tahun 1988, *market share* produk kayu lapis Indonesia telah menguasai hampir 50 % kayu lapis dunia dan menempatkan Indonesia sebagai pimpinan pasar yang sangat tangguh sampai dengan dibubarkannya Badan Pemasaran Bersama (BPB) Apkindo awal tahun 1988. Sampai dengan awal tahun 1990-an sektor kehutanan memberikan kontribusi terhadap pendapatan nasional

kedua terbesar setelah migas, dan urutan ketiga di bawah migas dan tekstil sejak medio 1990-an (Nurrochmat 2005).

Sektor kehutanan juga telah membuktikan sebagai suatu sektor yang memberikan peran signifikan terhadap pembangunan ekonomi, seperti sebagai penghasil devisa, pendorong ekonomi wilayah, pendukung sektor-sektor ekonomi lain yang terkait, dan juga sebagai penyedia lapangan kerja. Selama krisis ekonomi di Indonesia sektor kehutanan masih mampu memberikan kontribusi yang relatif signifikan terhadap perekonomian Indonesia, hasil devisa yang diperoleh dari ekspor hasil hutan pada tahun 1999/2000 antara lain adalah US\$ 84,02 juta dari *pulp* dan US\$ 93,99 juta dari *paper*, serta devisa dari ekspor kayu olahan selama lima tahun terakhir berjumlah sebesar US\$ 28,12 juta untuk kayu gergajian, US\$ 2.720,33 juta untuk kayu lapis (Pusat Rencana Kehutanan Departemen Kehutanan RI 2001).

Akan tetapi eksploitasi manfaat hutan khususnya hasil hutan kayu selama lebih dari tiga dekade dengan tidak memperhitungkan kelestariannya harus dibayar mahal dengan degradasi hebat kualitas dan kuantitas sumberdaya hutan. Hal tersebut diikuti juga dengan semakin menurunnya sumbangan subsektor kehutanan terhadap PDB yang hanya 1 % selama 10 tahun terakhir. Rendahnya sumbangan sektor kehutanan terhadap PDB seringkali dijadikan alasan bagi pemegang kebijakan untuk menempatkan sektor kehutanan sebagai sektor yang marginal dalam perencanaan pembangunan nasional. Karena dalam paradigma yang dipakai selama ini, sumbangan subsektor kehutanan hanya dilihat dari aspek ekonomi dan kurang mempertimbangkan aspek lain, seperti lingkungan hidup.

Kontribusi sektor kehutanan dalam bidang lingkungan hidup seperti: menjaga keseimbangan alam, mencegah banjir, mencegah kekeringan dan tanah longsor belum diperhitungkan secara ekonomi. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya besaran-besaran terukur yang bisa mengungkap peran hutan dan subsektor kehutanan secara utuh dan menyeluruh. Walaupun ada, baru hanya sebatas kajian akademik sehingga belum pada tahap implementasi kebijakan di lapangan. Oleh karena itu dibutuhkan cara pandang baru dengan melihat kontribusi hutan dan sektor kehutanan secara utuh dan holistik.

Dengan demikian, perumusan masalah yang akan dibahas dalam karya tulis ini adalah 1) Bagaimana meletakkan sektor kehutanan dalam konteks pembangunan perekonomian nasional 2) Apakah cara perhitungan kontribusi sektor kehutanan dalam perekonomian nasional yang dilakukan selama ini sudah sesuai dengan besarnya peran sektor kehutanan dalam menjaga kelestarian sumberdaya 3) Adakah cara perhitungan lain untuk mengukur kontribusi sektor kehutanan dalam perekonomian nasional;

I. 2. Uraian Singkat

Gagasan kreatif yang ingin disampaikan dalam karya tulis Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap Perekonomian Indonesia ini adalah bagaimana menempatkan sektor kehutanan secara proporsional dalam pembangunan nasional, dengan memperhatikan sumbangan sektor kehutanan secara utuh, sehingga tidak hanya memandang sektor kehutanan dari sumbangannya terhadap PDB Nasional. Gagasan yang lain adalah bagaimana menghitung sumbangan sektor kehutanan terhadap perekonomian nasional secara lebih proporsional.

I. 3. Tujuan dan Manfaat

Tujuan dari penyusunan karya tulis Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap Perekonomian Indonesia ini adalah :

1. Meletakkan sektor kehutanan secara proporsional dalam pembangunan nasional.
2. Menentukan penghitungan kontribusi sektor kehutanan yang lebih proporsional.
3. Memberikan gambaran kontribusi sektor kehutanan secara lebih proporsional, berdasarkan sumbangan terhadap PDB dan keterkaitannya dengan Sektor lain.

Sedangkan manfaat yang diharapkan adalah agar menjadi bacaan yang tepat bagi pembaca, agar paradigma sektor kehutanan yang termarginalkan dari kebijakan perencanaan pembangunan nasional, akibat dari pemenuhan PDB dari sektor kehutanan yang kurang signifikan dari tiap tahun anggaran, dapat berubah.

BAB II. TELAAH PUSTAKA

II. 1. Sumber Daya Hutan

Menurut Chang (2003) hutan adalah kumpulan fungsi *biotis* yang didominasi oleh pepohonan dan kayu yang menutupi areal yang luas, yang mendukung pengurusan kompleksitas flora dan fauna, dan juga membentuk perbedaan struktur iklim mikro apabila dibandingkan dengan bentuk penggunaan lahan yang lain. Apapun tipe hutan yang terbentuk berdasarkan pengkelasan karakteristiknya, fungsi yang terbentuk bukan hanya untuk menyediakan sumberdaya alam dengan jumlah besar, namun juga untuk membentuk keragaman dari fungsi lingkungan (tata air, udara, dan tanah), hingga fungsi sosial budaya, untuk dimanfaatkan secara menyeluruh dan lestari.

Menurut Badan Planologi Kehutanan (2008) pola pemanfaatan sumberdaya hutan ke depan akan lebih beragam dari sisi jenis hasilnya, yaitu kayu, hasil hutan bukan kayu (HHBK), dan produk jasa lingkungan. Oleh karena itu dalam memanfaatkan sumberdaya hutan secara menyeluruh dan lestari di masa depan perlu mempertimbangkan konsep “*joint production*” dari suatu hamparan kawasan yang dapat dihasilkan beragam komoditas sekaligus, baik melalui alokasi ruang maupun temporal dalam implementasi pengelolaan lainnya, dan berorientasi pada pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) yang diukur sebagai dasar pendapatan negara.

II. 2. Pengertian Produk Domestik Bruto

Dalam sistem neraca pendapatan nasional dikenal istilah Produk Domestik Bruto (PDB). Konsep dasar yang sudah lama dianut adalah jika elemen penyusutan (depresiasi) modal buatan manusia (*man-made capital* atau *produced capital*) dikurangkan dari nilai PDB, maka diperoleh nilai Produk Domestik Neto (PDN). Selanjutnya jika PDN ini dikurangi lagi dengan nilai pajak tidak langsung (*indirect taxes*) maka didapatkan nilai Pendapatan Nasional.

Di Indonesia, perhitungan nilai PDB yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) adalah PDB dengan pendekatan nilai tambah yang diciptakan oleh semua sektor kegiatan ekonomi (lapangan usaha) di negara tersebut.

Untuk mempermudah perhitungan nilai tambah, BPS membagi sektor perekonomian di Indonesia menjadi beberapa sektor usaha, salah satunya yaitu Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan;

Kemudian perhitungan nilai PDB dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan diantaranya:

- 1) Untuk keperluan analisis ekonomi serta perencanaan pembangunan nasional, berdasarkan struktur kegiatan ekonomi atau lapangan usaha;
- 2) Dipergunakan sebagai salah satu tolak ukur atau instrumen untuk menilai keberhasilan pembangunan nasional;
- 3) Dipergunakan untuk mengetahui (auditor) hasil-hasil pembangunan sehingga rencana pembangunan nasional selanjutnya dapat disusun secara lebih rinci. Hal ini ditegaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RP JMN) 2004-2009.
- 4) Pembedaan kategori negara maju dan negara berkembang atau terbelakang dengan melihat tinggi rendahnya tingkat pendapatan nasional per kapita di negara-negara tersebut. Dari hal tersebut laju pertumbuhan pendapatan nasional digunakan sebagai tolak ukur kemajuan suatu negara dan kecepatan transformasinya dari negara agraris ke negara industri dan negara jasa (Suparmoko dan Nurrochmat 2005).

II. 3. Perhitungan PDB Sektor Kehutanan

Sebagai bagian dari perekonomian nasional, kontribusi sektor kehutanan terhadap PDB nasional dapat dihitung melalui pendekatan nilai tambah (BPS 2005). Nilai tambah yang diciptakan sektor kehutanan merupakan perbedaan nilai suatu barang/jasa yang timbul sebagai akibat suatu kegiatan produksi dan/atau distribusi hasil hutan.

Produksi sektor kehutanan dapat berupa hasil hutan kayu, rotan, daun, buah dan lain-lain; dan dapat pula berupa kegiatan rekreasi dan wisata hutan

lainnya. Kedua jenis produk itu walaupun berbeda sifatnya namun memiliki ciri yang sama dalam hal produknya dapat dipasarkan.

Jenis produk hutan yang lain adalah jasa lingkungan yang diberikan oleh hutan yang berupa kemampuan menahan air, menahan banjir, menahan erosi, sebagai tempat hidup keanekaragaman hayati, maupun penyerap karbon (carbon sink); yang semuanya itu tidak ada transaksi pasar dalam penggunaan atas produk jasa lingkungan tersebut.

Karena belum ada transaksi pasarnya, maka dalam perhitungan PDB yang berlaku di Indonesia pada saat ini, jasa lingkungan tidak dimasukkan ke dalam perhitungan PDB. Salah satu alasan yang sering dikemukakan, adalah karena jasa-jasa lingkungan tersebut merupakan barang publik dan memiliki eksternalitas dimana semua pihak yang memanfaatkan jasa lingkungan tersebut tidak harus melakukan pembayaran kepada pengelola hutan. Ciri barang publik adalah tidak diberlakukannya “*exclusion principle*” dan “*rivalry in consumption*” (Suparmoko dan Nurrochmat, 2005).

II. 4. Aspek *Multiplier Effect*

Menurut Biro Perencanaan dan Keuangan (2007) *Multiplier Effect* adalah dampak suatu sektor terhadap perekonomian nasional yakni terhadap peningkatan output wilayah, penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat apabila terjadi perubahan *final demand* dari sektor kehutanan. Dari keterangan tersebut, Badan Planologi Kehutanan (2008) menerangkan bahwa *Multiplier Effect* dibagi menjadi tiga aspek dasar, yaitu :

II. 4. 1. Employment Multiplier Effect

Employment multiplier (aspek tenaga kerja) mengukur perubahan total dalam lapangan kerja sebagai hasil dari perubahan lapangan kerja awal dari suatu industri tertentu. Lapangan kerja tambahan dalam aktivitas baru dikalikan dengan employment multiplier dari industri kehutanan memberikan perkiraan total lapangan kerja baru yang tercipta dalam ekonomi.

Dalam studi hutan alam maupun hutan tanaman, employment multiplier effect dari sektor kehutanan juga ikut memberikan sumbangan lapangan pekerjaan

bagi masyarakat, dengan tingkat efektifitas dan efisiensi lapangan pekerjaan yang bisa diperhitungkan.

II. 3. 2. Income Multiplier Effect

Income multiplier (aspek pendapatan masyarakat) mengukur peningkatan total income dalam suatu ekonomi sebagai akibat dari peningkatan satu unit income yang diterima oleh pekerja dalam industri tertentu.

II. 3. 3. Output Multiplier Effect

Output multiplier (aspek output wilayah terhadap perekonomian nasional) merupakan perkiraan total perubahan dalam penjualan dalam suatu ekonomi sebagai hasil dari peningkatan satu satuan permintaan dari luar sistem ekonomi tersebut. Menggandakan peningkatan penjualan dari industri penghasil dengan output multiplier memberikan perkiraan peningkatan total penjualan di wilayah yang bersangkutan, termasuk penjualan ke luar wilayah.

II. 5. PDB Hijau

Penghitungan PDB yang dilakukan hingga saat ini (PDB Konvensional) sebenarnya baru menghitung nilai total barang dan jasa akhir (*final product*) yang dihasilkan selama satu tahun dan dinyatakan dalam nilai rupiah. Nilai PDB (konvensional) tersebut seolah-olah memberikan gambaran tentang struktur perekonomian dan pertumbuhan ekonomi yang dialami oleh suatu daerah, baik secara total maupun secara sektoral, sehingga dianggap mencerminkan kondisi perekonomian daerah yang bersangkutan. Namun demikian, sesungguhnya anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar karena nilai sumberdaya alam yang hilang (dieksploitasi) dan kerusakan (degradasi) lingkungan belum diperhitungkan sebagai nilai kehilangan dan kerusakan yang seharusnya dibayar, sehingga nilai-nilai yang tercantum dalam PDB yang konvensional itu belum menunjukkan nilai kesejahteraan masyarakat yang sesungguhnya. Dalam konteks sektor kehutanan, dalam penghitungan PDB hijau, nilai ekonomi yang diperhitungkan juga tidak hanya hasil hutan kayu dan non kayu, akan tetapi termasuk juga di dalamnya manfaat ekonomi dari jasa lingkungan.

BAB III. METODE PENULISAN

III. 1. Prosedur Pengumpulan Data dan/atau Informasi

Dalam penyusunan karya tulis Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap Perekonomian Indonesia ini dilakukan dengan studi literatur. Literatur yang dikumpulkan adalah data-data yang berasal dari hasil kajian yang telah dilaksanakan oleh Departemen Kehutanan, Fakultas Kehutanan, BPS, Internet, serta institusi lain yang berhubungan dengan kajian yang dibahas dalam karya tulis ini.

III.2. Prosedur Pengolahan Data dan/atau Informasi

Data dan informasi yang telah terkumpul di olah dengan menggunakan analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah membuat deskripsi dan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, serta hubungan antar fenomena yang dianalisis/dibahas.

III. 3. Analisis-Sintesis

Teori atau materi yang didapatkan dari literatur-literatur yang telah diperoleh sebelumnya, digabungkan dan kemudian diselaraskan dengan ide solusi yang ingin ditampilkan, lalu dianalisis dengan mengacu pada studi pustaka yang diambil.

III. 4. Pengambilan Kesimpulan dan Perumusan Saran

Kesimpulan diambil berdasarkan analisis yang telah dilakukan. Sedangkan perumusan saran didasarkan pada prediksi transfer gagasan.

BAB IV. ANALISIS DAN SINTESIS

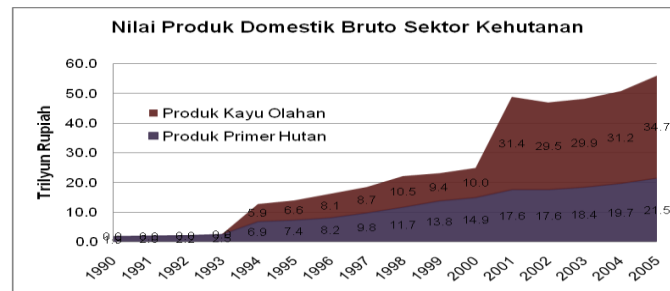
IV. 1. Analisis

IV. 1. 1. Sumbangan Sektor Kehutanan Terhadap PDB

Dalam sistem perhitungan PDB yang berlaku saat ini, yang diperhitungkan dalam PDB sub sektor kehutanan, yang merupakan bagian dari sektor pertanian, hanyalah kegiatan sektor hulu dan industri primer pengolahan hasil hutan. Sedangkan kegiatan di sektor hilir dan industri pengolahan hasil hutan lanjutan tidak termasuk nilai tambah yang diperhitungkan dalam sub-sektor kehutanan.

Perkembangan nilai nominal PDB sektor kehutanan dari tahun 1993 sampai dengan tahun 2003 disajikan pada Gambar 1 berikut ini.

Gambar 1. Perkembangan Nilai Nominal PDB Kehutanan 1993-2005

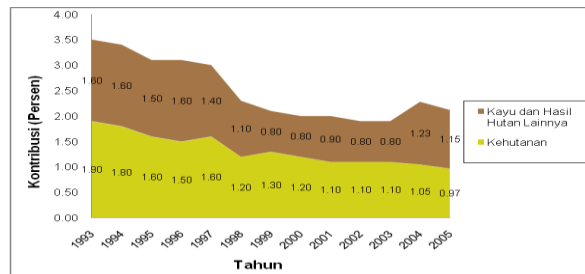


(Sumber :
Dephut 2007)

Dari Gambar 1 dapat dilihat bahwa berdasarkan nilai nominalnya PDB sektor kehutanan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. PDB sektor kehutanan pada tahun 1993 yang nilai nominalnya kurang dari Rp 15 Trilyun, sepuluh tahun kemudian pada tahun 2005 telah meningkat lebih dari dua kali lipat mendekati angka Rp 35 Trilyun, atau sekitar 20% dari PDB sektor kehutanan.

Namun peningkatan tersebut tidak sejalan dengan pembentukan PDB Indonesia yang terus menurun dari waktu ke waktu, padahal pendapatan sektor kehutanan telah dimasukkan ke dalam pendapatan sektor industri di bawah Departemen Perindustrian. Rata-rata kontribusi sub-sektor kehutanan terhadap PDB nasional kurang dari 1,3 % (Suparmoko dan Nurrochmat 2005). Hal ini terlihat dari Gambar 2 berikut :

Gambar 2. Kontribusi Sektor Kehutanan serta Barang Kayu dan Hasil Hutan Lainnya pada PDB dengan Migas



(Sumber :
Dephut 2007)

Gambar 2 di atas memberikan ilustrasi kontribusi hasil hutan kayu dan hasil pengolahan (industri) kayu dan hasil hutan lainnya terhadap nilai PDB dengan Minyak Bumi dan Gas Alam. Dari gambar tersebut terlihat bahwa kontribusi subsektor kehutanan pada PDB dengan migas, kontribusi sub-sektor kehutanan turun terus dari 1,9 % pada tahun 1993 menjadi 0,97 % pada tahun 2005. Dan penurunan tersebut juga berlaku pada PDB untuk industri barang kayu dan hasil hutan lainnya. Dari fakta tersebut dapat diduga adanya korelasi yang kuat antara produksi kayu di sektor kehutanan dengan industri pengolahan kayu dan hasil hutan lainnya.

Kecilnya kontribusi sektor kehutanan terhadap PDB nasional disebabkan karena nilai PDB kehutanan hanya menghitung manfaat *tangible* hasil hutan terutama kayu serta nilai tambah dari industri primer hasil hutan, serta pencatatan hasil hutan kayu dan non kayu cenderung kurang akurat, sehingga sumberdaya yang dimanfaatkan, lebih sedikit dibandingkan dengan sumberdaya yang tercatat sebagai sumbangan sektor kehutanan.

Di sisi lain, manfaat *intangible* yang sangat besar dari sektor kehutanan dan kontribusinya terhadap penciptaan nilai tambah bagi sektor lain tidak tercermin dalam nilai PDB. Atau dengan kata lain, nilai tambah bagi sektor lain dari sektor kehutanan dalam perhitungan PDB konvensional yang berlaku sekarang ini dinilai terlalu rendah (*undervalued*).

IV. 1. 2. Multiplier Pendapatan (*income multiplier*) Sektor Kehutanan

Dalam hal *income multiplier effect*, sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 1, sektor kehutanan mempunyai *income multiplier* sebesar 1,79. Hal ini menunjukkan bahwa jika sektor kehutanan membayar upah baru sebesar 1 milyar

rupiah, total upah yang diterima oleh pekerja di semua sektor adalah 1,79 milyar rupiah. Dibandingkan dengan sektor berbasis sumberdaya alam lainnya, sektor kehutanan memiliki income multiplier paling tinggi.

Tabel 1. Income Multiplier Sektor Perekonomian Nasional

NO	SEKTOR	INCOME MULTIPLIER
1	Kehutanan	1.79
2	Lembaga keuangan	1.73
3	Pertanian Tanaman Pangan	1.56
4	Pertambangan dan penggalian	1.55

Sumber : Tabel I-O Indonesia 2003 (data diolah) dalam (Departemen Kehutanan, 2008).

IV. 1. 3. Multiplier Output (*output multiplier*) Sektor Kehutanan

Jik dilihat dalam Multiplier Output, dengan nilai output multiplier sebesar 1,84 (Tabel 2) berarti bahwa jika terjadi peningkatan *final demand*, misalnya investasi atau ekspor, di sektor kehutanan sebesar satu unit, maka output ekonomi secara total akan meningkat sebesar 1,84 kali. Satu unit akan dijual keluar sistem ekonomi tersebut, sedangkan 0,84 unit akan dikonsumsi oleh sistem ekonomi yang bersangkutan.

Tabel 2. Output Multiplier Sektor Perekonomian Nasional

NO	SEKTOR	OUTPUT MULTIPLIER
1	Pemerintahan umum, pertahanan dan jasa sosial kemasyarakatan	3,02
2	Lembaga keuangan	1,90
3	Kehutanan	1,84
4	Pertanian Tanaman Pangan	1,57

Sumber : Tabel I-O Indonesia 2003 (data diolah) dalam (Departemen Kehutanan, 2008).

IV. 1. 4. Multiplier tenaga Kerja (*employment multiplier*) Sektor Kehutanan

Purnomo (2006) menggambarkan bahwa sektor kehutanan mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar terutama di daerah pedesaan, lokasi investasi sektor kehutanan tumbuh. Bahkan dari hal tersebut, sektor kehutanan menempati posisi ke lima dalam daftar *employment multiplier effect*.

Dalam suatu penelitian yang dilakukan oleh Purnomo (2006), suatu data yang menunjukkan bahwa 1 tenaga kerja penuh akan terserap secara permanen untuk setiap 3,5 ha hutan tanaman skala kecil dan 23,5 ha hutan tanaman skala besar. Dengan asumsi biaya pembangunan hutan tanaman hingga siap panen adalah 10 juta rupiah per hektar, maka untuk membangun 3,5 hektar hutan tanaman dibutuhkan dana investasi sebesar 35 juta rupiah. Dengan demikian setiap investasi sebesar 1 milyar rupiah dalam hutan tanaman skala kecil akan diciptakan 29 lapangan kerja di sektor kehutanan dan 36 lapangan kerja di sektor lainnya. Angka 10 juta rupiah memang terasa besar, tetapi jumlah ini dipergunakan untuk kebutuhan tanaman selama 8 tahun sehingga secara rata-rata hanya 1,25 juta rupiah per ha per tahun.

Selain itu, akibat dari *multiplier effect* makin memperjelas keterkaitan sektor kehutanan dengan sektor-sektor lainnya, atau biasa disebut dengan *linkages* (*backward* dan *forward*). *Forward and backward linkages* merupakan faktor penting dalam merumuskan urgencitas sektor kehutanan, karena memperhatikan keterkaitan antar sektor dalam suatu sistem perekonomian (sebuah negara). Sektor yang memiliki indeks *Backward* dan *Forward Linkages* yang kuat jika bernilai lebih dari 1 (>1).

IV. 1. 5. Penghitungan PDB Hijau Pada Sektor Kehutanan

Penghitungan PDB yang dilakukan hingga saat ini (PDB Konvensional) sebenarnya baru menghitung nilai total barang dan jasa akhir (*final product*) yang dihasilkan selama satu tahun dan dinyatakan dalam nilai rupiah, yang seolah-olah memberikan gambaran tentang struktur perekonomian dan pertumbuhan ekonomi yang dialami oleh suatu daerah, baik secara total maupun secara sektoral, sehingga dianggap mencerminkan kondisi perekonomian daerah yang bersangkutan namun berkesan bias. Namun demikian, sesungguhnya anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar karena nilai sumberdaya alam yang hilang (dieksploitasi) dan kerusakan (degradasi) lingkungan belum diperhitungkan sebagai nilai kehilangan dan kerusakan yang seharusnya dibayar, sehingga nilai-nilai yang tercantum dalam PDB yang konvensional itu belum menunjukkan nilai kesejahteraan masyarakat yang sesungguhnya.

Dalam kaitannya dengan penggunaan sumberdaya alam, pendekatan yang digunakan dalam menghitung PDB Konvensional biasanya adalah pendekatan nilai tambah atau pendekatan produksi. Berdasarkan konsep perhitungan PDB Konvensional pengambilan sumberdaya alam justru dinyatakan sebagai penciptaan nilai tambah dan belum diperhitungkan sebagai modal alam yang hilang yang juga harus dinilai penyusutannya seperti halnya dengan penyusutan modal buatan manusia (gedung, mesin dan sebagainya).

Apabila nilai PDB Konvensional (yang sering juga disebut dengan PDB Coklat) kemudian dikurangi dengan nilai penurunan sumberdaya alam, maka didapatkan nilai PDB Semi Hijau. Untuk itu perlu diidentifikasi jenis sumberdaya alam apa saja dan berapa jumlahnya yang digunakan dalam suatu kegiatan perekonomian dalam satu tahun, kemudian dicari nilai ekonominya (valuasi ekonomi).

Setelah nilai PDB Semi Hijau diperoleh, maka perlu dikaji apakah ada kerusakan atau degradasi lingkungan di daerah yang bersangkutan. Bila ditemukan telah terjadi degradasi lingkungan seperti pada tanah/lahan, air dan udara, maka diidentifikasi macam dan volume kerusakannya dan kemudian dihitung nilainya.

Namun karena dalam penghitungan PDB Hijau berkaitan dengan kegiatan ekonomi yang menggunakan sumberdaya alam sebagai input, maka untuk sementara nilai atas penggunaan (*Use Value*) saja yang diutamakan penghitungannya.

IV. 2. SINTESIS

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, perhitungan sumbangan sektor kehutanan yang ideal adalah dengan menggunakan PDB Hijau karena sudah memasukkan nilai pengambilan sumberdaya alam (deplisi) serta nilai kerusakan (degradasi) lingkungan, akan tetapi hal tersebut masih belum dapat dilaksanakan, karena hal tersebut belum dijadikan standar nasional dan nilai ekonomi lingkungan dari hutan belum bisa dihitung nilai pasarnya secara pasti, sehingga jika PDB hijau digunakan maka sumbangan sektor kehutanan akan bertambah

kecil karena PDB yang dihasilkan oleh sektor kehutanan akan semakin kecil, karena dikurangi dengan sumberdaya yang diambil dan kerusakan yang dihasilkan.

Oleh karena penghitungan kontribusi sektor kehutanan dengan menggunakan metode PDB hijau belum memungkinkan, maka salah satu cara untuk menghitung kontribusi sektor kehutanan secara proporsional adalah dengan cara melihat kontribusi sektor kehutanan dari *multiplier effect* serta *forward linkages* dan *backward linkages*nya, hal tersebut jelas terlihat dari analisis data yang telah dijelaskan sebelumnya.

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

V. 1. Kesimpulan

Dari perumusan masalah serta tujuan yang telah dibuat, yang kemudian dianalisis dan disintesis dalam bab sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan bahwa :

1. Pembaca dapat memahami pentingnya sektor kehutanan dalam penentuan kebijakan perencanaan pembangunan nasional, dilihat dari faktor *multiplier effect*, dan keterkaitan antar sektor (*forward linkages* dan *backward linkages*). Serta menumbuhkan pemahaman bahwa sektor usaha kehutanan tidak hanya dilihat dari industri hulu kehutanan dalam pemenuhan pendapatan negara menurut skema PDB, namun juga dapat dilihat dari industri hilir serta fungsi jasa lingkungannya. Hal tersebut yang dapat dijadikan acuan proporsionalitas peletakkan sektor kehutanan dalam pembangunan nasional
2. Dalam proses tersebut (proporsionalitas sektor kehutanan dalam pembangunan nasional) cara penghitungan melalui skema PDB hijau dapat dijadikan salah satu solusi.

V. 2. Saran

Perumusan saran yang diajukan dalam mendukung kesimpulan adalah :

1. Sistem penghitungan terhadap kontribusi sektor kehutanan yang dilakukan saat ini adalah keliru dan tidak tepat sehingga perlu ditinjau ulang;
2. Perhatian terhadap pembangunan sektor kehutanan seharusnya tidak hanya dilihat dari sisi PDB yang semakin menurun, namun perlu pula ditinjau dari aspek lain yang lebih strategis, misalnya efek pengganda (*multiplier effect*), dan *linkages*.
3. Badan Pemasaran Bersama untuk produk-produk kehutanan perlu dihidupkan kembali dengan sistem yang lebih adil dan transparan bagi para anggotanya. Dan harus ada regulasi yang mengarah pada mekanisme insentif dan disinsentif berbasis kinerja bagi para pelaku bisnis kehutanan;